

## DPRD dan Bupati Grobogan Setujui Perubahan APBD 2022



### GEMA DPRD KAB. GROBOGAN



**GROBOGAN (KR)** - DPRD Grobogan menyetujui dan menyepakati Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna ke-40

DPRD Grobogan, Rabu (7/9). Persetujuan tersebut dituangkan dalam nota kesepakan yang ditandatangani pimpinan DPRD yang diwakili Wakil Ketua DPRD Ir HM Nurwibowo MSI dan H Sugeng Prasetyo SE MM bersama Bupati Grobogan Hj Sri Sumami SH MM.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Grobogan Ir HM Nurwibowo MSI dihadiri Wabup Grobogan dr Bambang Pujiyanto Mkes, anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, Sekda beserta para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD beserta jajarannya, Kepala Bagian Setda, para Camat dan para Direktur BUMD.

Dalam sambutannya, Bupati Grobogan Hj Sri Sumami

SH MM mengatakan, berdasarkan laporan hasil rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Grobogan, yang di dalamnya telah disampaikan juga pendapat akhir masing-masing Fraksi Dewan, yang pada kesimpulannya bahwa fraksi-fraksi Dewan menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2022 sebagaimana hasil pembahasan.

"Dengan telah diterima dan disetujuinya Rancangan Perubahan APBD Grobogan tahun anggaran 2022 oleh DPRD tersebut, maka saya yang menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2022 sebagaimana hasil pembahasan," ujarnya.

Dijelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, mengamanatkan bahwa pa-

ling lambat tiga hari kerja, setelah persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan AP-BD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2022.

Tujuan diadakan evaluasi tersebut, agar tercapai keserasian antara kebijakan daerah dan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparat, serta untuk meneliti sejauhmana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil evaluasi tersebut dimungkinkan terdapat saran, masukan, koreksi maupun hal lainnya yang kesemuanya bertujuan untuk kesempurnaan Perubahan APBD Grobogan 2022.

"Dengan telah sampainya tahap penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas Ra-

perda tentang Perubahan APBD Grobogan tahun anggaran 2022, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan, khususnya Badan Anggaran DPRD atas kerja sama yang terjalin baik selama ini, sehingga proses pembahasan dapat berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama," ucap bupati.

Mengenai saran, pendapat maupun masukan yang telah disampaikan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2022, bupati menyebutkan, pendapatan daerah sebesar Rp 2.545.774.624.652, sedangkan belanja daerah sebesar Rp 2.853.656.553.384.

Pembiayaan daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 351.131.928.732, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 43.250.000.000, sehingga pembiayaan neto surplus sebesar Rp 307.881.928.732. Selanjutnya sisa lebih pembiayaan anggaran daerah setelah pembiayaan netto sebesar Rp 0. (Tas)



**Bupati Grobogan dan Wakil Bupati bersama DPRD Grobogan tengah menandatangani persetujuan Perubahan APBD 2022.**

## Antisipasi Inflasi Dianggarkan Rp 7 Miliar

**KLATEN (KR)** - Pemkab Klaten sisihkan dana sebesar Rp 7 miliar atau dua persen dari DAU. Hal itu sesuai dengan perintah dari menteri keuangan, guna menjaga daya beli masyarakat.

Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo didampingi para wakil ketua, usai rapat paripuraan DPRD Klaten dengan agenda penetapan Perda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2022, Selasa (7/9).

Ketua DPRD mengemukakan, secara umum dalam pembahasan rancangan perubahan APBD 2022 tersebut tidak ada pergeseran

anggaran. Namun saat pembahasan di badan anggaran, muncul surat dari Menteri Keuangan yang intinya Pemkab harus menganggarkan sekitar 2% dari DAU.

"Hal itu untuk menangani kesiapan jika ada inflasi. Surat tersebut baru datang pada saat pembahasan, maka langsung disiapkan angkanya, dan secara teknis akan ada rakor eksekutif dengan kementerian. Seperti apa perkem-

bangkan, nanti akan saling melaporkan, yang penting sudah kita pacak dulu anggarannya. Secara teknis detail juklak juknisnya menunggu arahan dari pusat. Anggaran sekitar Rp 7 miliar, ini digeserkan dari BTT," kata Hamenang.

Bupati Klaten Sri Mulyani mengemukakan, Perubahan APBD 2022 yang telah disetujui DPRD tersebut akan segera disampaikan kepada gubernur Jawa Tengah untuk dimintakan evaluasi.

Para kepala satuan kerja perangkat daerah diperintahkan untuk segera menindaklanjuti dengan merencanakan dan me-

laksanakan kegiatan sebaik-baiknya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Proses MoU perubahan APBD 2022 sudah lancar, nanti kita mohonkan evaluasi pada Pak Gubernur segera proses cepat sehingga Oktober sudah bisa kita laksanakan. Mengingat waktu cukup terbatas di penghujung tahun 2022 ini, maka harus ada proses percepatan, karean kalau tidak dipercepat percuma anggaran dan perencanaan tidak bisa dilaksanakan karena teerbatasnya waktu," kata Bupati. (Sit)

## PERHATIKAN BOCAH PENDERITA EPILEPSI Mensos Rutin Berikan Layanan Fisioterapi



KR-Rini Suryati

### Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi kediaman Muhammad Fiqri Al Baihaqi di Brebes.

**BREBES (KR)** - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengunjungi kediaman Muhammad Fiqri Al Baihaqi di Brebes, Jawa Tengah. Bocah 11 tahun ini divonis dokter menderita epilepsi dan sering mengalami kejang. Melalui jalan darat dari Surabaya, Mensos langsung menuju kediaman Fiqri di Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jateng. Mensos datang disambut ayah-ibu Fiqri dan keluarga dekat.

Kepada keluarga, Mensos menyatakan, dengan usia yang masih muda, Fiqri memiliki kesempatan besar untuk bisa membaik kondisinya. Namun hal itu perlu penanganan segera dan intensif. "Insya Allah, Fiqri bisa membaik. Tapi memang perlu penanganan intensif," kata Mensos. Untuk keperluan itu, Mensos mengarahkan jajaran untuk memberikan layanan fisioterapi.

"Saya akan berikan layanan fisioterapi untuk Fiqri. Supaya bisa ditangani secara khusus oleh petugas. Setiap hari harus diterapi. Kalau di rumah sakit pasien yang ditangani banyak," kata Mensos. Keluarga diduduki dalam agar bisa melakukan fisioterapi secara mandiri dan rutin di rumah dengan mengoleskan minyak kayu putih dan minyak zaitun ke sejujur kaki Fiqri disertai gerakan kaki untuk merangsang otot dan melenyutkan tulang kaki.

Kepada keluarga, Mensos sudah menawarkan agar Fiqri bisa dirawat di Sentra "Satria" Baturraden milik Kemensos. Namun dengan berbagai pertimbangan, keluarga memilih Fiqri dirawat di rumah. Keluarga Fiqri telah mendapatkan dari Kemensos berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan lain dari pemerintah daerah setempat. Keluarga Fiqri terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memiliki kartu jaminan Kesehatan BPJS yang masih aktif.

Fiqri lahir normal, namun pada usia 4 bulan jatuh sakit (demam tinggi). Pengobatan sudah dilakukan beberapa kali namun demam terulang dengan kondisi kejang. Dengan ayah sebagai nelayan dan ibu penjual jajanan, keluarga ini tidak mampu menanggung biaya pengobatan Fiqri. Tiga tahun terakhir Fiqri menjalani pengobatan secara mandiri di rumah dengan berbekal obat resep dari dokter dan dapat dibeli di apotik terdekat apabila obat habis pakai. Selain epilepsi dan kejang, Fiqri juga mengalami keterlambatan tumbuh kembang. (Ati)

## PKS Jateng Minta Kenaikan Harga BBM Dibatalkan

**SEMARANG (KR)** - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng Muh Haris, minta kepada Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). PKS Jateng khawatir kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM akan meningkatkan jumlah rakyat miskin di Jateng.

Demikian ditegaskan Muh Haris yang juga selaku Wakil Walikota Salatiga, kepada wartawan di Semarang Kamis (7/9). Kebijakan menaikkan harga BBM tersebut akan membuat banyak warga masyarakat merasa kesu-

litan secara ekonomi. "Kenaikan BBM ini akan membuat rakyat kesulitan. Sekarang ini tekanan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid 19 belum sepenuhnya pulih. Untuk itu PKS menyarankan kepada pemerintah sebaiknya membatalkan kebijakannya menaikkan harga BBM. Ini untuk memulihkan kembali ekonomi masyarakat agar bisa segera bangkit," Tutur Haris.

Hal senada juga disampaikan Ketua FPKS DPRD Jateng Agung Budi Margono. Ia mengatakan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Kebijakan menaik-

an harga BBM dampaknya sangat besar dan akan merambat ke berbagai sektor baik di skala nasional maupun di Jateng.

Diprediksi, Jateng akan menjadi daerah dengan tingkat Kemiskinan tertinggi Kembali setelah kenaikan harga BBM. Oleh karenanya PKS Jateng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyuarakan penolakan Kenaikan Harga BBM. "Mbh piye carane kudu batal, karena ini pasti sangat menyulitkan masyarakat," tegas Agung.

Agung mengambil contoh pada Mei 2022, Jateng mengalami Inflasi sebesar 0,58% yang disebabkan

oleh kenaikan harga angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, dan kue kering berminyak. Penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah penurunan harga minyak goreng, emas perhiasan, udang basah, beras, dan nangka muda.

"Tingkat inflasi tahun kalender Mei 2022 sebesar 2,87 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2022 terhadap Mei 2021) sebesar 3,91 persen. Sebelum harga BBM naik saja, harga beberapa bahan makanan pokok seperti minyak goreng, telur, cabe, bawang merah sudah naik. Dengan naiknya harga BBM akan semakin

menambah kesengsaraan rakyat kecil," tutur Agung.

Menurut Agung, kenaikan harga BBM kontraproduktif dengan upaya pemberantasan kemiskinan di Jawa Tengah. Amanat Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RJPMD) Jateng 2018-2023, isu strategisnya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, kenaikan harga BBM ini mengancam RJPMD Jateng, karena akan menambah jumlah rakyat miskin.

"Membengkaknya APBN yang oleh pemerintah sering disebut karena adanya subsidi BBM, seharusnya bisa disiasati de-

ngan melakukan efisiensi anggaran. Keseriusan pengentasan kemiskinan bisa dibuktikan dengan keberpihakan anggaran. Pada praktiknya, porsi

anggaran bagi dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak lebih besar daripada anggaran dinas lainnya," tegas Agung. (Bdi)



**Ketua DPW PKS Jateng Muh Haris (kanan).**

## Konsisten Terapkan GRC, PTSG Raih TOP GRC Awards 2022

**SEMARANG (KR)** - Kinerja bagus PT Semen Gresik (PTSG) dalam mengelola perusahaan, membuah prestasi yang terus mengalir. Anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) yang berdiri di Kabupaten Rembang mulai 10 Januari 2014 ini, kembali menorehkan dua penghargaan bergengsi di ajang TOP GRC Awards 2022 yang diselenggarakan oleh majalah TopBusiness In-

donesia di Dian Ballroom Hotel Rafles Jakarta (6/9).

Di ajang tahunan ini, Semen Gresik berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus yakni, TOP GRC Awards 2022 #4 Stars dan The Most Committed GRC Leader 2022 untuk Direktur Utama PTSG Subhan. General Manager of Communication & Legal PTSG Fardhi Sjahruil Ade dalam keterangan pers, Kamis (8/9/2022) menyampai-

kan rasa syukur, terima kasih dan apresiasi atas penghargaan tersebut. Dia menilai, capaian ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi perusahaan dalam menerapkan GRC (Governance, Risk Management & Compliance).

"Penghargaan ini semakin mendorong kami untuk mengimplementasikan GRC sehingga dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional," jelasnya.

Redaksi Majalah TopBusiness, M Lutfi Handayani mengatakan, TOP GRC Awards 2022 merupakan kegiatan penghargaan GRC terbesar dan paling membanggakan di Indonesia. Penilaian dilakukan secara objektif dan independen oleh dewan juri kepada lebih dari 1000 perusahaan terkemuka di Indonesia.

Dengan mengusung tema GRC Empowerment in Digital era and its Support

to G20 Presidency, lanjut M Lutfi acara ini bekerja sama dengan Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), ICOPi (Institute Compliance Professional Indonesia, dan PaGI (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia). "Selain kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan, di dalam TOP GRC Awards 2022 juga banyak aspek pembelajaran bersama di bidang implementasi GRC, khususnya bagi perusahaan-perusahaan peserta," ujar M Lutfi.

Ketua Dewan Juri TOP GRC Awards 2022 Antonius Alijoyo mengatakan, dengan semakin efektifnya implementasi GRC ini, maka kinerja bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia, akan tetap aman dan tumbuh dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat dan investor, baik dari dalam dan luar negeri akan terjaga dan bahkan makin meningkat. (Isi)

## Mimbar Legislatif

### Jaga Distribusi Bahan Pangan Untuk Tahan Laju Inflasi

**KETUA** Komisi B DPRD Jateng Sumanto mengingatkan pemerintah supaya menjaga stabilitas harga pangan untuk menjaga inflasi daerah. Problem utama inflasi adalah terkait harga pangan dan energi. Dengan kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak perlu mendapatkan perhatian serius demi menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto dalam acara Prime Topic DPRD Jateng di Solo, Rabu (7/9). Pemerintah daerah harus menjaga kestabilan harga bahan pangan karena berpotensi turut menyumbang inflasi daerah. Pemerataan distribusi menjadi kunci. Jangan ada harga komoditas yang melambung tinggi atau hilang di pasaran.

Kepala Biro Perekonomian Jateng Eddy Sulistyio Bramantyo mengatakan, Pemprov Jateng melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) telah melakukan berbagai langkah antisipatif mengenai lonjakan inflasi, dengan menggelar operasi pasar dan pemerataan distribusi sejumlah komoditas. Hal itu sesuai arahan pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi yang harus menjadi agenda prioritas daerah.

Pengendalian inflasi menjadi fokus perhatian pemerintah daerah dan menjadi prioritas, kare-



**Sumanto**

na dampak inflasi cukup luas, termasuk pada pertumbuhan ekonomi dan berdampak pula pada persoalan pengangguran dan kemiskinan. Mengingat pemerataan stok komoditas pangan, setiap hari Pemprov Jateng berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengontrol berbagai macam kebutuhan pangan guna menjaga harga harga tidak naik.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng menunjukkan tingkat inflasi yang terjadi di Jateng selama Juli 2022 mencapai 0,51 persen. Inflasi Juli tersebut lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 0,85 persen. Kenaikan harga cabai merah dan bawang merah menjadi salah satu pemicu terjadinya inflasi. Adapun penurunan harga minyak goreng, bawang putih, serta beras menjadi penahan laju inflasi Juli.

Dari enam kota besar tempat dilakukannya survei indeks harga konsumen, inflasi tertinggi dialami Kota Semarang dan Tegal masing-masing 0,59 persen lebih tinggi dari inflasi Jateng. Adapun inflasi terendah terjadi Kota Surakarta dan Cilacap dengan masing-masing 0,35 persen. (\*)

(Disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)



KR-Isdiyanto

**Mahdiyatus Sholikhah dan Rivian Yuris Ardani perwakilan dari unit LGRC (Legal & GRC) PT Semen Gresik berfoto bersama dengan piala penghargaan TOP GRC Awards 2022.**